

Pendapatan Masuk ke “Preman”

DPRD Minta Pelabuhan Rembang Diaudit

REMBANG-Teka-teki kemana larinya uang pungutan Pelabuhan Tanjung Bonang (Rembang) selama beroperasi akhirnya terjawab. Pendapatan dari aktifitas bongkar muat pelabuhan yang belum memiliki ijin ini disebutkan masuk ke kantong ‘preman’. Berapa nilai pendapatan dari bisnis ilegal tersebut saat ini masih dipermasalahkan DPRD Rembang.

Kepastian larinya pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara itu terungkap setelah dilakukan dengar pendapat antara PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dan Komisi A DPRD Rembang di ruang komisi, kemarin.

**PELABUHAN
REMBANG
ILEGAL**



PT RBSJ yang didirikan oleh mantan Bupati Rembang Muhammad Salim ini diwakili oleh Direktur RBSJ Prilesty.

Saat memberikan keterangan terkait legalitas pelabuhan Bonang serta pendapatan dari operasional pelabuhan,

■ Baca PENDAPATAN ..hal 7

PENDAPATAN

dari hal 1

Prilesty menyebut pungutan yang dibebankan kepada pemakai jasa pelabuhan yang belum berstatus legal tersebut sebagai uang preman. Diakui pelabuhan Bonang belum memiliki ijin dari pemerintah.

Berdasarkan fakta di lapangan, dewan menemukan adanya operasional ilegal di pelabuhan.

Prilesty didesak menjelaskan kemana larinya uang hasil dari operasional ilegal itu “Apakah ke RBSJ, ke UPP, atau ke Kas Daerah, atau malah justru menuju para pimpinan kami di DPRD,” tukas Wakil Ketua DPRD, Ridwan.

Prilesty pun mengakui, memang ada penarikan jasa pelabuhan. Namun lahan pelabuhan yang diklaim mencapai 28 hektar tersebut belum berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sehingga retribusi yang dikenakan kepada pengguna jasa pelabuhan yang tentunya ilegal, disebutkan sebagai uang preman. Ketika ditanya dewan siapa yang menikmati pungutan tersebut, ia pun menyebutkan dana masuk ke kantong investor.

“Kita sampai berkonsultasi dengan BPK, mereka pun tidak bisa memberi bahasa yang tepat. Namun walau belum ada kejelasan tanah, pemakai jasa pelabuhan ses-

uai amanat rapat Propinsi dan asas kemanfaatan, jasa pelabuhan harus tetap dipungut. Istilahnya uang preman,” jelas bos perusahaan berplat merah itu.

Ridwan menganggap, RBSJ juga yang mesti menyelesaikan kisruh di pelabuhan ini dengan melakukan audit. “Harapannya audit nanti bisa ketemu satu titik, jika tidak selesai masalah (pelabuhan, red) ini bisa berujung fatal,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Ilyas menambahkan, PT RBSJ merupakan kunci permasalahan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang. Karena perusahaan milik Pemda inilah yang paling mengerti tentang reklamasi, kontrak, pengelolaan hingga investasi di pelabuhan. Dia menyarankan, perlu dilakukan audit investasi dan audit pendapatan jasa pelabuhan, demi memperjelas persoalan tentang saling klaim sejumlah perusahaan investor.

PT RBSJ melalui anak perusahaannya PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) merupakan pihak yang menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Pemkab terkait pembangunan pelabuhan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke tersebut.

“RBSJ perlu merinci investasi yang dikeluarkan investor, sedangkan au-

dit pendapatan juga bisa menjelaskan berapa besar pendapatan yang telah dinikmati oleh para investor hingga sekarang ini,” tegasnya.

Prilesty pun menjawab, keinginan DPRD tentang audit tentunya perlu mempertimbangkan *appraisal* layak atau tidak. “*Appraisal* itu terdiri dari Tim Audit pendapatan dan Tim audit saham yang digunakan investor,” pungkasnya.

Selain menghadirkan Prilesty, DPRD juga memanggil sejumlah pihak terkait, diantaranya Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika (Dinhubkominfo), Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPKAD), dan Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM).

Berdasarkan data yang dihimpun, reklamasi dan pengembangan pelabuhan menyertakan modal Rp 99 miliar. Dana sebesar itu belum termasuk tambahan alokasi dana dari APBN (sebesar 50 miliar untuk pembangunan tahun 2009, red) dan APBD Kabupaten Rembang.

Sedangkan total wilayah pelabuhan saat ini seluas 28 hektar diantaranya bersumber dari investasi RBSJ, PT Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK), PT Amir Hajar Klisi (AHK), dan Bangun Artha (BAK). (sov/muz)